

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan keluarga merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh keluarga serta mayoritas saham di perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga. Fahlenbarch *et al.*, (2009) mengklasifikasikan perusahaan dapat dikatakan perusahaan keluarga apabila pendiri perusahaan (*founder*) dan atau generasi kedua (*descendants*) merupakan komisaris atau direktur perusahaan. Perusahaan keluarga memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat menyerap banyak tenaga kerja. Hasil survei *Price Waterhouse Coopers* pada tahun 2014 bahwa 95% perusahaan *go public* di Indonesia merupakan perusahaan keluarga.

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan kontrol pemegang saham dalam kegiatan operasional perusahaan. Terdapat dua macam struktur kepemilikan, yakni kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004). Kepemilikan saham dikatakan menyebar apabila kepemilikan saham tersebar secara relatif merata ke publik, sehingga tidak ada pihak yang memiliki saham terlalu dominan.

Adanya konsentrasi kepemilikan dapat menimbulkan risiko ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Ekspropriasi didefinisikan sebagai suatu proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (La Porta *et al.*, 2000). Anggota keluarga sebagai pemegang saham pengendali dapat mengintervensi pemegang saham minoritas untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham pengendali yang lebih mementingkan kepentingan pribadi keluarganya. Penelitian Berle *et al.*, (1932) menjelaskan bahwa terdapat konflik yang terjadi antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Anggota keluarga yang memegang posisi eksekutif puncak memiliki kendali penuh terhadap keputusan perusahaan. Semakin kuat pengendalian yang di dominasi oleh keluarga dalam perusahaan akan menimbulkan konflik yang biasanya disebut konflik keagenan tipe II.

Salah satu upaya untuk mengurangi konflik keagenan adalah dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, agar mencapai kinerja yang optimal serta mewujudkan iklim usaha yang sehat. Salah satu proksi yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip *GCG* adalah ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen, dikarenakan dapat meningkatkan pengawasan atas pengelolaan perusahaan. Hal ini didorong oleh kebutuhan pasar yang menuntut perusahaan publik menjalankan sistem manajemennya secara baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia merupakan negara yang menganut *two board system*, yaitu pemisahan tugas antara dewan komisaris dan direksi yang sesuai anggaran dasar dan

peraturan perundang-undangan (KNKG 2006). Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada dewan direksi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sedangkan direksi bertugas untuk mengelola dan menetapkan kebijakan perusahaan. Di Indonesia, dewan komisaris dan komisaris independen ditunjuk oleh RUPS (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Dewan komisaris adalah pihak yang terafiliasi dengan perusahaan. Hubungan afiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi atau dewan komisaris lainnya. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan, yang menunjukkan efektivitas pengawasan perusahaan (Maztoul, 2014). Semakin banyak jumlah dewan komisaris akan semakin efektif dalam mengawasi perusahaan, dikarenakan dapat memberikan saran dengan perspektif yang lebih luas sebagai opsi strategis perusahaan (Pearce dan Zahra 1992), sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Selain ukuran komisaris, komisaris independen juga menjadi salah satu indikator penerapan *GCG*, yang merupakan pihak eksternal yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan umum dan khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan saran pada direksi. Proporsi komisaris independen diukur dengan perbandingan jumlah komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka pengawasan akan berjalan lebih objektif dan dapat mencegah tindakan ekspropriasi

yang dilakukan pemegang saham mayoritas serta meningkatkan prinsip independensi agar perusahaan bebas dari tekanan pemegang saham mayoritas yang mengintervensi pemegang saham minoritas, sehingga meningkatkan kepercayaan *shareholder* dan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan hasil pencapaian manajemen dari kegiatan operasional dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan.

Beberapa penelitian tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang berbeda. Penelitian yang telah dilakukan oleh Al-Ghamdi dan Rhodes (2015) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sebaliknya Saidat *et al.*, (2018) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hanson *et al.*, (2011) menyatakan ukuran dewan komisaris yang besar berpengaruh negatif terhadap perusahaan, sebaliknya Pearce dan Zahra (1992) menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kutdlats dan McDowell (2015) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian yang tidak konsisten ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan keluarga?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan keluarga?
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibentuk, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bahwa adanya konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan keluarga.
2. Untuk mengetahui bahwa adanya ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan keluarga.
3. Untuk mengetahui bahwa adanya proporsi komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan, serta menjadi referensi untuk pertimbangan gagasan atau opini dalam

memberikan informasi tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan

2. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap perusahaan untuk melakukan pertimbangan pada konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian mengenai konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. Dari latar belakang yang dibuat penulis, terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Pada bab ini juga dijelaskan tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan, penelitian sebelumnya, hipotesis, model analisis, dan kerangka penulisan.

Bab 3: Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan tentang pendekatan penelitian yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data terukur dan alat statistik, mengidentifikasi variabel yang diteliti, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian, analisis data yang dilakukan, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

Bab 5: Simpulan dan Saran

Bab ini membahas mengenai simpulan penelitian dan saran – saran yang relevan.